



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALAN BUN

JALAN SUTAN SYAHRIR NOMOR 46, PANGKALAN BUN, KALIMANTAN TENGAH 74114;
TELEPON (0532) 21502; FAKSIMILE (0532) 21834; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-103/KNL.1202/2026

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalan Bun
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja KPKNL Pangkalan Bun tahun 2025
Tanggal : 3 Februari 2026

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor: ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj), kami sampaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Pangkalan Bun sebagaimana terlampir pada tautan berikut [LAKIN KPKNL Pangkalan Bun 2025](#).

Dengan semangat BAGAWI (Bersih, Amanah, Guyub, Akuntabel, Wibawa, Ikhlas), KPKNL Pangkalan Bun senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Atas perhatian Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Ari Fitri Mahesa

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi
3. Kepala Seksi Kepatuhan Internal





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Pangkalan Bun
2025

Daftar Isi

BAB 1. Pendahuluan	11
A. Latar Belakang	13
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	15
C. Sumber Daya Manusia	16
D. Peran Strategis	17
BAB 2. Perancangan Kinerja	21
A. Rencana Strategis	23
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB 3. Akuntabilitas Kinerja	13
A. Capaian Kinerja Organisasi 2025	12
B. Realisasi Anggaran 2025	14



Ari Fitri Mahesa

Kepala KPKNL Pangkalan Bun

Sambutan Kepala KPKNL Pangkalan Bun

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berkat dukungan dan kerja sama seluruh jajaran, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dapat berjalan dengan baik serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun berhasil mencatat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,56%, yang menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, penguatan sistem pengendalian internal, serta penegakan prinsip integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Upaya penguatan Kode Etik Aparatur Sipil Negara, pembangunan budaya anti-korupsi, serta pencegahan gratifikasi dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pengembangan dan implementasi berbagai inovasi terus dilakukan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun.

Berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih selama tahun 2025 menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program kerja serta hasil dari sinergi dan kolaborasi yang terjalin baik dengan para pemangku kepentingan. Capaian tersebut menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kinerja pada tahun 2026 melalui perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Selanjutnya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun berkomitmen untuk mempertahankan dan menguatkan implementasi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, guna mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kepala KPKNL Pangkalan Bun



ditandatangani secara elektronik

Ari Fitri Mahesa



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Manusia
- D. Peran Strategis



A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, agar lebih efektif dan efisien maka dibentuk unit-unit vertikal DJKN di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pangkalan Bun, dianggap sebagai wilayah yang cukup strategis di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dibentuklah KPKNL Pangkalan Bun yang memiliki wilayah kerja mencakup 5 (lima) kabupaten di sekitarnya.

Sebagai instansi pemerintah, KPKNL Pangkalan Bun dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam hal mewujudkan kinerja yang berpegang pada prinsip-prinsip good governance beberapa isu strategis yang terjadi di tahun 2025 diantaranya adalah Pokok lelang Pegadaian yang belum optimal. Akan tetapi upaya yang terus dilakukan KPKNL Pangkalan Bun dalam pencapaian target dengan melakukan penggalan potensi lelang terhadap jenis lelang yang mempunyai potensi capaian besar seperti lelang BMD dan lelang perbankan.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pangkalan Bun dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

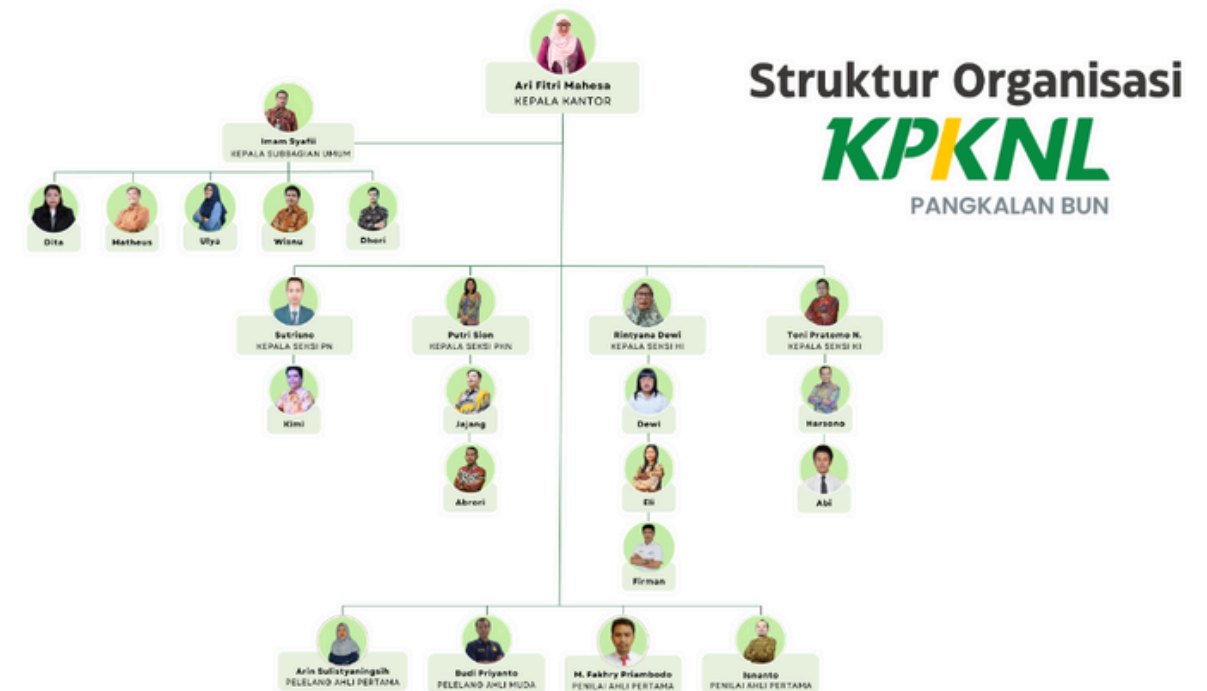
Aliquam iaculis lobortis ex ac tristique. Suspendisse fermentum velit leo, nec placerat lorem sodales et. Donec ipsum neque, fermentum ac euismod id, lobortis eget urna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus faucibus sollicitudin lobortis. Suspendisse potenti. Maecenas luctus, nisi a vulputate interdum, tortor ligula auctor ligula, vel pulvinar nibh ex eget quam.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun merupakan unit instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III (kepala kantor), 5 jabatan eselon IV, dan 5 jabatan fungsional sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyajian bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

7. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

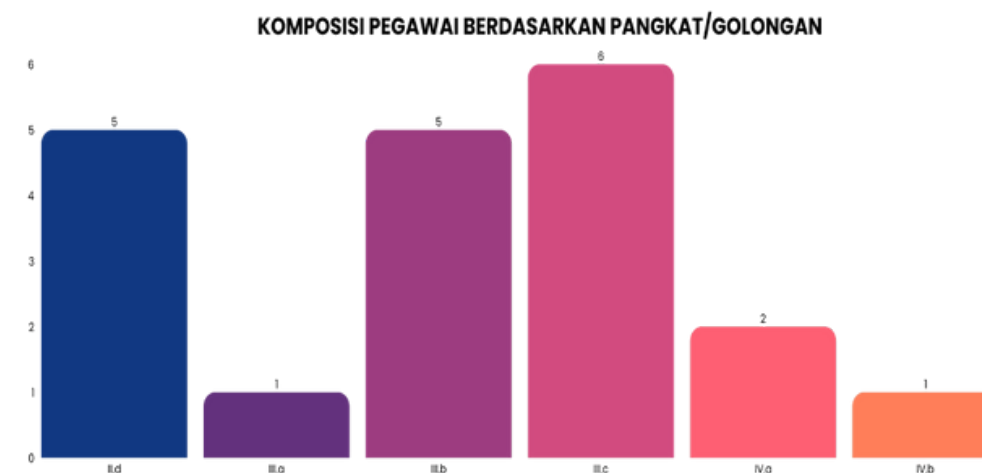
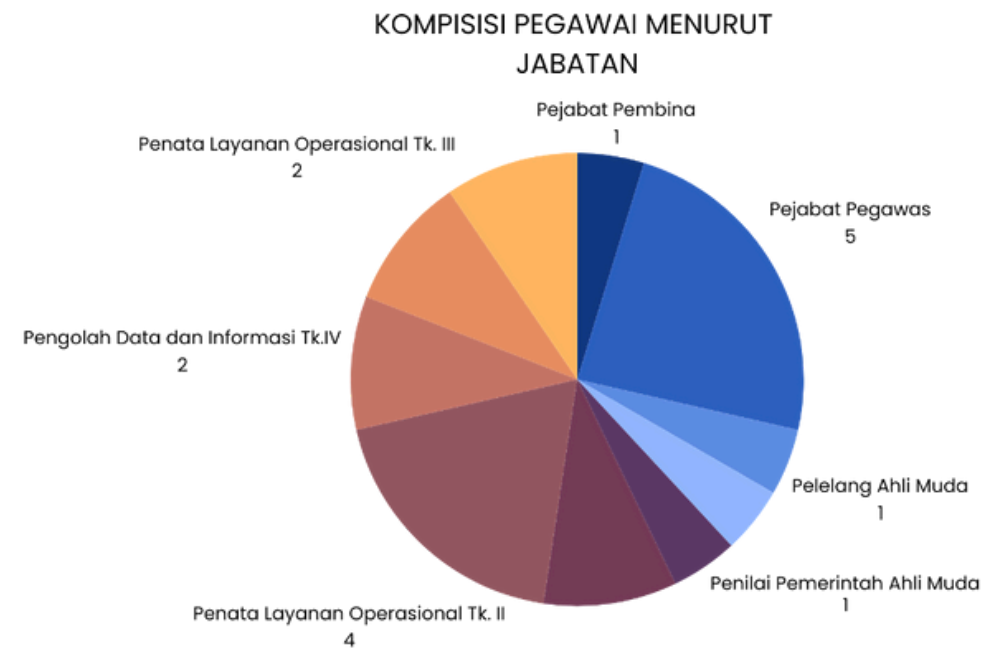


Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun merupakan unit instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III (kepala kantor), 5 jabatan eselon IV, dan 5 jabatan fungsional sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperansangat penting dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun. Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun serta kantor operasional di bawahnya per tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 25 pegawai termasuk dengan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebanyak 1 (satu), dengan komposisi sebagai berikut :



D. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi penyelenggaraan negara di bidang keuangan negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Pangkalan Bun memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai aset manager, KPKNL Pangkalan Bun mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal, dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Pangkalan Bun sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan, pemindahtanganan BMN, Pemanfaatan BMN, inventarisasi dan sertifikasi.

2. Memberikan Pembinaan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara merupakan pelayanan yang diberikan kepada instansi/badan/lembaga negara yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet sehingga sulit tertagih setelah dilakukan upaya penagihan. Piutang yang macet yang sulit tertagih tersebut dapat diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang pengurusannya diselenggarakan oleh KPKNL sebagai upaya penyelamatan keuangan negara sekaligus upaya penegakan hukum (Law enforcement) dalam masyarakat.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta dan transport untuk kepentingan peralihan hak.

4. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN, dan pengurusan piutang negara.

Dengan demikian hasil, penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Highest and Best Use.

5. Pengurusan Layanan Piutang Negara

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Biaya Administrasi (biad) pengurusan piutang negara dan bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Selain itu, dari hasil pemanfaatan BMN juga termasuk dalam PNBP yang disetor oleh Kementerian/Lembaga yang asetnya dimanfaatkan.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja



A. Rencana Strategis

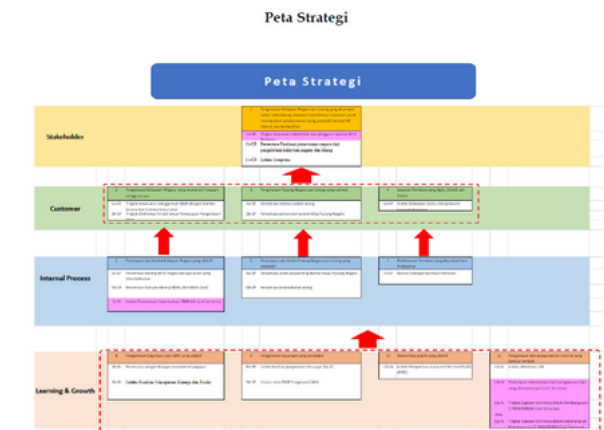
Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan. Perencanaan tersebut mengacu pada visi dan misi Kementerian Keuangan dan kemudian dituangkan dalam visi dan misi KPNL Pangkalan Bun.



Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai oleh KPNL Pangkalan Bun adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian dan lelang yang profesional, tertib, tepat guna dan optimal, serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder di wilayah kerja KPNL Pangkalan Bun. Tujuan tersebut disusun secara spesifik untuk jangka pendek dan terukur dalam bentuk sasaran strategis, antara lain:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
8. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif; dan
9. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi;

Kesembilan sasaran yang hendak dicapai tersebut dapat tergambar dalam peta strategi KPNL Pangkalan Bun 2025 sebagai berikut:



Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan kembali ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menjadi target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 oleh KPNL Pangkalan Bun.

A. Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPNL Pangkalan Bun Tahun 2025

No	Indeks Kinerja Utama	Target 2025
1	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
2	Indeks Integritas	100%
3	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%

No	Indeks Kinerja Utama	Target 2025
4	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
5	Persentase realisasi pokok lelang	100%
6	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
7	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
8	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
9	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
10	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
11	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100
12	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
13	Persentase produktivitas lelang	80%
14	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
15	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%
16	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
17	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
18	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisas Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja KPNL Pangkalan Bun Tahun 2025 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan oleh KPNL Pangkalan Bun dengan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2024 sebesar 116,56%, dengan rincian sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI											
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALAN BUN											
PERIODE S.D. TRIWULAN IV											
TAHUN 2025											
Kode	SS/IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan	
Stakeholder Perspective											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya										
1a-CP	Indeks integritas	MAX	P/L	100,00	105,29	19%	57,58%	105,29%	101,72%	Hijau	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100,00%	96,87%	14%	42,42%	96,87%	96,87%	Kuning	
Customer Perspective											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal										
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	MAX	P/L	100,00%	117,27%	19%	40,43%	117,27%	117,27%	Hijau	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/M	100,00%	97,17%	14%	29,79%	97,17%	97,17%	Kuning	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	MAX	P/M	100,00%	179,79%	14%	29,79%	179,79%	120,00%	Hijau	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa										
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	MAX	P/M	74,00	89,90	14%	50,00%	121,49%	120,00%	Hijau	
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	MAX	P/M	77,00	95,20	14%	50,00%	123,64%	120,00%	Hijau	
Internal Business Process Perspective											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif										
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikasikan	MAX	P/M	100,00%	124,66%	14%	50,00%	124,66%	120,00%	Hijau	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	MAX	P/M	100,00%	120,00%	14%	50,00%	120,00%	120,00%	Hijau	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif										
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	MAX	P/M	100,00%	122,22%	14%	33,33%	122,22%	120,00%	Hijau	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	MAX	P/M	70,00%	112,81%	14%	33,33%	161,16%	120,00%	Hijau	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	80,00%	112,31%	14%	33,33%	140,38%	120,00%	Hijau	
Learning & Growth Perspective											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif										
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	MAX	P/M	100,00	120,00	14%	33,33%	120,00%	120,00%	Hijau	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	MAX	P/M	100,00%	125,22%	14%	33,33%	125,22%	120,00%	Hijau	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	80,00%	98,00%	14%	33,33%	122,50%	120,00%	Hijau	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif										
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	MAX	P/M	100,00	117,65	14%	50,00%	117,65%	117,65%	Hijau	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	MAX	P/M	80,00	110,00	14%	50,00%	137,50%	120,00%	Hijau	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif										
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	MAX	P/M	80,00	96,78	14%	100,00%	120,98%	120,00%	Hijau	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)										113,63%	Hijau

Pada tahun 2025, capaian NKO mengalami penurunan sebesar 2.51% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan signifikan capaian Outstanding PN dan IKPA dibandingkan dengan tahun 2024.

1.	Sasaran Strategis 1	:	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya
	1.a-CP	:	Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari internal pegawai Kementerian Keuangan dengan masa kerja minimal 12 bulan pada unit sampel dan pihak eksternal seperti pengguna layanan dan rekanan. Komponen penilaian integritas terdiri dari:

1. Internal

- Perdagangan Pengaruh;
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan SDM;
- Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
- Sosialisasi Antikorupsi; dan
- Transparansi.

2. Eksternal

- Upaya Pencegahan Korupsi;
- Transparansi dan Keadilan Layanan; dan

3. Integritas Pegawai

Formula perhitungan capaian IKU Indeks Integritas adalah nilai hasil survei dan FGD dikurangi faktor koreksi dan ditambah dengan apresiasi. Faktor koreksi terdiri dari keterjadian OTT/fraud, hasil audit investigasi, pengondisian, dan informasi APH. Sedangkan, apresiasi terdiri dari penilaian atas realisasi rencana aksi perbaikan dari hasil SPI dan penilaian atas kegiatan pencegahan di Unit Eselon I.

Mengingat tugas dan fungsi KPKNL Pangkalan Bun banyak bersinggungan secara langsung dengan pengguna jasa dan rekanan, terdapat risiko penurunan indeks integritas. Oleh karena itu, KPKNL Pangkalan Bun telah melakukan langkah pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi antikorupsi, melaksanakan publikasi prosedur layanan serta sarana pengaduan, memberikan sharing knowledge service excellence kepada seluruh pegawai, dan melaksanakan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Capaian IKU Indeks Integritas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2025 adalah 105.29 dari target sebesar 100 atau 57.58% dari target yang ditetapkan.

Tabel Indeks Integritas

KPKNL Pangkalan Bun	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max
Realisasi	-	-	-	-	-	10.529	10.529	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	10.529%	10.529%	
Nilai Kinerja								

Sasaran Strategis 1	:	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya
1b-CP IKU	:	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang ditargetkan sebesar 100%. IKU ini bertujuan untuk menyajikan realisasi atas optimalisasi Penerimaan Negara yang Bersumber Dari Kekayaan Negara. Capaian IKU ini diperoleh atas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang. Penerimaan dari masing-masing bidang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kekayaan Negara	3.162.000.000	3.249.313.447	103
Lelang	5.106.100.000	4.946.491.995	97
PN	2.100.000	2.309.317	110
Jumlah	10.368.000.000	8.198.114.759	309,6

Capaian Realisasi PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara tahun 2025 adalah sebesar Rp3.249.313.447 dengan target Rp3.162.000.000 (telah mencapai target lebih dari 100%).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- Penggunaan Barang Milik Negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
- Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/ Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

Walaupun wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun meliputi lima kabupaten, namun hanya sedikit K/L yang memiliki instansi vertikal di wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun, sehingga BMN yang dapat dilakukan Pemanfaatan serta Penjualan BMN yang telah rusak berat juga relatif kecil.

Capaian realisasi jumlah PNBPN dari Pengurusan Biaya Administrasi Piutang Negara pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.309.317 dengan target Rp2.100.000 (telah mencapai target lebih dari 100%).

Capaian realisasi PNBPN Lelang adalah sebesar Rp4.946.491.995 dengan target Rp5.106.100.000 (telah mencapai target lebih dari 100%). Komponen PNBPN Lelang berasal dari:

- a. Bea lelang pembeli dan penjual yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
- b. Bea lelang pembeli dan penjual dari lelang sukarela;
- c. Bea lelang batal atas permintaan penjual;
- d. Biaya permohonan lelang;
- e. Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi; dan
- f. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Secara keseluruhan IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Langkah KPKNL Pangkalan Bun agar ketiga target tersebut dapat tercapai antara lain:

- 1) Melakukan himbuan kepada satker yang memiliki BMN yang tidak digunakan untuk mendukung tugas agar dilakukan pemanfaatan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPB Kalimantan Tengah untuk memperoleh data PNBPN Aset;
 - 3) Melakukan monitoring tindak lanjut atas surat persetujuan yang telah diterbitkan oleh KPKNL;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk semua jenis lelang;
- Melakukan penggalan potensi terkait piutang negara maupun piutang daerah di wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun.

Tabel

Raw Data Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KPKNL Pangkalan Bun	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max
Realisasi	91,85%	95,21%	95,21%	100,87%	10.087%	96,87%	96,87%	TLK
Capaian	91,85%	95,21%	95,21%	100,87%	10.087%	96,87%	96,87%	
Nilai Kinerja	120							

Sasaran Strategis 2	:	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
2a-CP IKU	:	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. IKU ini bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan BMN.

KPKNL Pangkalan Bun memiliki target pengukuran SBSK sebanyak 459 NUP pada tahun 2024. Target tersebut merupakan Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor, Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya, Tanah dan/atau bangunan Pendidikan/Tahanan/Persidangan pada satker Kementerian/Lembaga pada Satker Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara. Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan pada tahun 2025 adalah sebesar 117.27% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Untuk memperoleh capaian ini, KPKNL Pangkalan Bun telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada satker agar dapat mengoptimalkan penggunaan BMN dengan penunjang penghuni untuk Rumah Negara yang kosong beserta Surat Ijin Penghunian (SIP);
2. Merekomendasikan satker untuk berkoordinasi dengan korwil dan/atau Mabes TNI dan/atau Mabes Polri dalam hal akan melakukan reklasifikasi terhadap BMN yang kodefikasinya tidak sesuai;
3. Melakukan Pendataan dan Pengukuran BMN yang menjadi target;
4. Melakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK; dan
5. Menyusun Laporan SBSK.

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPKNL Pangkalan Bun untuk meminimalisasi risiko data capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang tidak akurat adalah melaksanakan survei lapangan atas aset yang akan dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Sedangkan, untuk risiko rendahnya tingkat optimalisasi BMN, KPKNL Pangkalan Bun berencana untuk memberikan arahan kepada Satker agar dapat mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menunjuk penghuni bagi rumah negara yang kosong dan merekomendasikan Satker untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Mabes TNI dan/atau Mabes Polri untuk melakukan reklasifikasi terhadap BMN yang kodifikasinya tidak sesuai.

Tabel
Raw Data Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
Tahun 2025

KPNL Pangkalan Bun	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max
Realisasi	100%	133%	133%	110,86%	110,86%	117,27%	117,27%	TLK
Capaian	100%	133,33%	133,33%	110,86%	111%	117,27%	117,27%	
Nilai Kinerja	120							

Sasaran Strategis 2	:	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa
2.2 IKU	:	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian
		2. SSBP
		3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian
		2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
		3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian
		2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
		3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian
		2. Berita acara serah terima
	Pemindahtanganan	Penjualan
2. SSBP		
Pemindahtanganan	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima
		2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
		3. Pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	Berita acara serah terima

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui penguatan peran Pengawasan dan Pengendalian BMN oleh Pengelola Barang.

Capaian IKU ini dihitung berdasarkan persentase jumlah tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2024 s.d. semester I 2025 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN dari jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II 2024 s.d. semester I 2025. Pada tahun 2025, KPKNL Pangkalan Bun berhasil mencapai 86,21% nilai tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN dari target sebesar 80%. Untuk memperoleh capaian ini, KPKNL Pangkalan Bun telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan yang telah diterbitkan KPKNL;
2. Menyampaikan surat monitoring tindak lanjut kepada Satker; dan
3. Berkoordinasi dengan calon penyewa.

Rencana aksi KPKNL Pangkalan Bun untuk meminimalisasi risiko keterlambatan Satker dalam menindaklanjuti persetujuan pengelolaan aset adalah dengan melaksanakan koordinasi dengan Satker yang mengajukan permohonan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN.

Tabel

Raw Data Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	40%	-	-	8.650%	8.650%	Max
Realisasi	-	-	%	-	-	100%	100%	TLK
Capaian	-	-	20.598%	-	-	11.561%	11.561%	

Sasaran Strategis 3	:	Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal
3.1 IKU	:	Persentase realisasi pokok lelang

Persentase realisasi pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada masyarakat serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan lelang.

Realisasi IKU ini berasal dari jumlah total pokok lelang pegadaian, PL I, PL Muda, dan PL Pertama dibandingkan dengan total target pokok PL I, PL Muda, dan PL Pertama selama tahun 2024. Beberapa sumber realisasi pokok lelang sebagai berikut

1. Realisasi pokok lelang PL I sampai dengan bulan Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.597.226.869 . atau sebesar 89,13% dari targetnya yang sebesar Rp 1.792.000.000.
2. Realisasi pokok lelang PL Muda sampai dengan bulan Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.232.531.408 atau sebesar 86,68% dari targetnya yang sebesar Rp 1.422.000.000.
3. Realisasi pokok lelang PL Pertama sampai dengan bulan Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp 364.695.461 atau sebesar 98,57% dari targetnya yang sebesar Rp 370.000.000.
4. Realisasi pokok lelang pegadaian sampai dengan bulan Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp 97.642.362 atau sebesar 112,47% dari targetnya yang sebesar Rp 150.000.000.

Sehingga nilai akhir capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang adalah sebesar Rp 1.694.869.231 atau sebesar 87,27% dari targetnya yang sebesar Rp 1.942.000.000.

Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang sebagian besar berasal dari lelang eksekusi yaitu sebesar 87,27% dari total realisasi pokok lelang pada tahun 2025. KPKNL Pangkalan Bun telah melakukan beberapa langkah untuk memaksimalkan potensi lelang di wilayah Pangkalan Bun, antara lain:

1. Penggalan potensi melalui surat dan penyampaian langsung kepada stakeholder;
2. Pengenalan lelang kepada masyarakat terutama terkait e-Auction;
3. Edukasi terkait lelang kepada stakeholder yang datang untuk konsultasi ke KPKNL Pangkalan Bun.

Langkah-langkah strategis dan inovatif yang sebagai usaha pencapaian target pokok lelang tahun 2025, dengan mengoptimalkan lelang Hak Tanggungan, lelang eksekusi Pengadilan Negeri, dan lelang sukarela yang berasal dari perusahaan kelapa sawit.

Tabel

Raw Data Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal							
	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max
Realisasi	92%	95%	95%	108%	108%	99%	99%	TLK
Capaian	92%	95%	95%	108%	108%	99%	99%	

Sasaran Strategis 3	:	Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal
2c-CP IKU	:	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). IKU ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian piutang negara. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan.
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap

Pada tahun 2025, capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara adalah sebesar Rp 224.743.703 atau sebesar 179,79% dari targetnya yang sebesar Rp125.000.000.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Pangkalan Bun antara lain:

1. Melakukan verifikasi terhadap BKPN dengan SP3N;
2. Melakukan pemutakhiran kondisi terkini atas keberadaan Penanggung Hutang dan kemampuan Penanggung Hutang;
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penggalan potensi;
4. Melakukan optimalisasi tahap pengurusan piutang negara serta menerbitkan PSBDT terhadap BKPN yang telah memenuhi persyaratan; dan
5. Melakukan penagihan secara nonformal/non juknis kepada Penanggung Hutang, baik melalui SMS maupun panggilan saluran telepon resmi KPKNL Pangkalan Bun.

Rencana aksi KPKNL Pangkalan Bun untuk meminimalisasi risiko rendahnya penurunan outstanding Piutang Negara adalah melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan hasil penggalan potensi, melakukan penagihan secara intensif, melaksanakan Crash Program keringanan utang, dan melaksanakan penggalan potensi penyerahan BKPN baru.

Tabel
Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max
Realisasi	132,28%	144,24%	144,24%	162,94%	162,94%	179,79%	179,79%	TLK
Capaian	132,28%	144,24%	144,24%	162,94%	162,94%	179,79%	179,79%	

Sasaran Strategis 5	:	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
5b-CP IKU	:	Tingkat kualitas layanan penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian menghitung ketepatan waktu penyelesaian kegiatan penilaian tersebut. IKU ini bertujuan untuk mewujudkan nilai wajar yang cepat dan akurat untuk dapat dijadikan acuan dalam berbagai kebutuhan. Capaian IKU diperhitungkan dengan memperhatikan jumlah hari penyelesaian permohonan penilaian yaitu diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian dan diakhiri dengan surat/nota dinas penyampaian laporan penilaian kepada pemohon. Adapun tujuan penilaian yang diperhitungkan dalam IKU ini antara lain penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN, penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN, penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN, penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam dengan batas waktu yang berbeda-beda tergantung pada tujuan penilaian.

Sepanjang tahun 2025, jumlah laporan penilaian yang dihasilkan oleh KPKNL Pangkalan Bun sebanyak 165 (dua ratus tiga puluh tujuh) laporan dengan objek penilaian hanya berupa penilaian BMN dan penilaian BMD. Adapun rincian laporan penilaian yang dihasilkan meliputi 16 (enam belas) laporan penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN, 110 (delapan puluh enam) laporan penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMN, 29 (dua puluh sembilan) laporan penilaian dalam rangka pemanfaatan BMD, dan 55 (seratus enam) laporan penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMD.

IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian pada saat ini hanya mengukur capaian penyelesaian pada Penilaian BMN dengan capaian akhir sebesar 112,30%. Berdasarkan hasil rekapitulasi penyelesaian laporan penilaian BMN, kegiatan penilaian pada KPKNL Pangkalan Bun dapat diselesaikan antara 3 – 13 hari kerja untuk penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN, dan antara 6 – 14 hari kerja untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMN.

Kendala yang dihadapi	Langkah-langkah yang telah Diambil
Permohonan usulan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN dapat diajukan langsung oleh Satuan Kerja melalui Aplikasi SIMAN berimplikasi pada tidak dapat diprediksi masuknya permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> · Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, dengan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, akan meningkatkan keandalan data awal permohonan penilaian dan efektivitas penyusunan jadwal survei lapangan · Berkoordinasi dengan baik dengan Satuan Kerja untuk mendukung kelancaran proses pengumpulan data/informasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan penilaian
Keterbatasan DIPA, dan/atau lokasi objek penilaian yang lokasi berulang, dan/atau lokasi objek penilaian yang jauh (potensi pelaksanaan survei lapangan yang tidak efisien)	<ul style="list-style-type: none"> · Penjadwalan survei lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan objek yang berlokasi pada kabupaten yang sama/dalam arah yang sama. · Pelaksanaan pengumpulan data menggunakan Metode Survei Lapangan Tanpa Peninjauan Langsung atau Penilaian Tanpa Survei Lapangan (PTSL)

Tabel
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max
Realisasi	114,61%	112,50%	112,50%	108,39%	108,39%	112,30%	112,30%	AVG
Capaian	114,61%	112,50%	112,50%	108,39%	108,39%	112,30%	112,30%	

Sasaran Strategis 4	:	Penerapan tata kelola aset yang efektif
4a-CP IKU	:	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah). IKU ini bertujuan untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Langkah yang telah dilakukan KPKNL Pangkalan Bun dalam mencapai target sertipikasi BMN berupa tanah adalah :

1. Menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi dengan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Wilayah BPN Kalteng, Satker target sertipikasi, dan Kantor Pertanahan;
2. One-on-one meeting dengan Kantor Pusat DJKN dan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah; Koordinasi dengan Satker dan Kantor Pertanahan target K1 dan K3 terkait progres sertipikasi;

Rencana aksi yang akan dilaksanakan KPKNL Pangkalan Bun untuk meminimalisasi risiko BMN berupa tanah yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan (SHP) adalah koordinasi yang lebih intensif dengan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN, dan Satker target sertipikasi.

Tabel
Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max
Realisasi	6,85%	56,16%	56,16%	95,89%	95,89%	124,66%	124,66%	TLK
Capaian	6,85%	56,16%	56,16%	95,89%	95,89%	124,66%	124,66%	

Sasaran Strategis 4	:	Penerapan tata kelola aset yang efektif
4b-CP IKU	:	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan). IKU ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

Capaian IKU ini diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah aset yang dievaluasi kinerja dan disampaikan rekomendasinya dengan jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya ditambah perbandingan antara jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker dengan jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker. Untuk memperoleh capaian ini, KPKNL Pangkalan Bun telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memonitoring progres Satker dalam menyusun tindak lanjut rekomendasi;
2. Melakukan asistensi kepada Satker terkait penyusunan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN;
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat PKKN terkait arahan penyusunan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Satker kepada KPKNL;
4. Membuat SK Tim Evaluasi Kinerja BMN dan surat pemberitahuan evaluasi kinerja BMN pada satker yang telah dipetakan.

Tabel
Persentase Portofolio Aset Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max
Realisasi	14,02%	91,06%	7.518%	101,67%	101,67%	120%	120%	TLK
Capaian	14,02%	91,06%	7.518%	101,67%	101,67%	120%	120%	

Sasaran Strategis 8	:	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif
8a-N IKU	:	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai dalam rangka memastikan bahwa atas seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja yang dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Pada tahun 2025, KPKNL Pangkalan Bun mendapatkan nilai Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko sebesar 96,78% yang menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja dan manajemen risiko pada KPKNL Pangkalan Bun telah dilaksanakan dengan sangat baik. Untuk memperoleh capaian ini, KPKNL Pangkalan Bun telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemutakhiran manual IKU pada aplikasi e-Performance;
2. Memantau pelaksanaan matriks tindak lanjut DKO;
3. Membuat artikel terkait manajemen kinerja;
4. Mengikuti e-Learning Manajemen Kinerja untuk seluruh pengelola kinerja, baik kinerja organisasi maupun kinerja pegawai;
5. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah untuk melaksanakan sharing knowledge pengelolaan kinerja pegawai;
6. Melaksanakan sosialisasi terkait reuiu kinerja pegawai dan pengisian SKP;
7. Membuka konsultasi bagi pegawai terkait manajemen kinerja.

Tabel
Raw Data Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	85	80	Max
Realisasi	99,24	96,72	96,72	96,25	96,25	96,78	96,78	TLK
Capaian	99,24	96,72	96,72	96,25	96,25	96,78	96,78	

Sasaran Strategis 6	:	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif
6c-N IKU	:	Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan. Dari standar jam pelatihan tersebut, minimal 1 pelatihan berasal dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 dan 1 dari pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Capaian IKU ini dihitung berdasarkan capaian utama dan capaian tambahan. Pada tahun 2025, KPKNL Pangkalan Bun memperoleh nilai 120% pada capaian Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan dan 100% pada capaian Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai (40 JP). Hal ini menunjukkan upaya KPKNL Pangkalan Bun dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja untuk mengikuti pelatihan dan kesesuaian pelaksanaan pelatihan pegawai KPKNL Pangkalan Bun dengan perencanaan pengembangan pegawai. Untuk memperoleh capaian ini, KPKNL Pangkalan Bun telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi mengenai kriteria IKU pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; dan
2. Mengimbuu kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan diklat maupun pelatihan melalui Kemenkeu Learning Center.

Tabel
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	80%	Max
Realisasi	32,43%	70,52%	70,52%	86,00%	86,00%	98,00%	98,00%	TLK
Capaian	32,43%	70,52%	70,52%	86,00%	86,00%	98,00%	98,00%	

Sasaran Strategis 6	:	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif
6a-CP IKU	:	Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. IKU ini bertujuan untuk Mengukur kinerja pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2025, KPKNL Pangkalan Bun memperoleh nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 120 dari target sebesar 100. Untuk memperoleh capaian ini, KPKNL Pangkalan Bun telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memonitoring realisasi anggaran setiap bulan;
2. Melaksanakan rapat penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD);
3. Memberi reminder atas kekurangan/kelebihan realisasi anggaran setiap bulan;
4. Memberi imbauan agar penyusunan RPD dilaksanakan secara lebih bijaksana dan sistematis; dan
5. Simulasi nilai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Rencana aksi KPKNL Pangkalan Bun untuk meminimalisasi risiko rendahnya nilai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran karena kurang optimalnya pelaksanaan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh kebutuhan dukungan anggaran yang besar untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kantor adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran, baik melalui Nota Dinas maupun melalui rapat.

Tabel
Indeks Kinerja Kualitas Anggaran Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	100	100	100	120	120	120	120	TLK
Capaian	100,00	100,00	100,00	120%	120%	120%	120%	

Sasaran Strategis 6	:	<i>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang Adaptif</i>
6b-N IKU	:	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa mengukur komponen meliputi kualitas pengelolaan (diukur dari tingkat penggunaan dalam negeri) dan indeks tata kelola pengadaan yang meliputi

- a. SIRUP
- b. e-Tendering
- c. e-Purchasing
- d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing
- e. e-Kontrak

KPKNL Pangkalan Bun tahun 2025 mendapatkan nilai Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 125.22% dari targetnya yang sebesar 100%.

Tabel
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX
Realisasi	140%	146%	100%	115%	115%	125%	125%	TLK
Capaian	140%	146%	100%	115%	115%	125%	125%	

Sasaran Strategis 7	:	<i>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</i>
7b-N IKU	:	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pelaksanaan pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berlandaskan pada UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Perhitungan atas Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik;
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

Pada tahun 2025, realisasi dari tingkat Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) adalah 110.

Tabel
Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX
Realisasi	115	110	110	110	110	110	110	AVG
Capaian	115	110	110	110	110	110	110	

Sasaran Strategis 3	:	<i>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</i>
3b-N IKU	:	Indeks kepuasan pengguna layanan

Upaya peningkatan layanan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari waktu ke waktu menunjukkan progres yang konsisten, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga kesinambungan mutu pelayanan publik. Meskipun Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) secara umum menunjukkan tren positif, beberapa aspek seperti kecepatan pelayanan, kemudahan akses informasi, dan responsivitas petugas masih menjadi sorotan pengguna. Hal ini menandakan bahwa perbaikan layanan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan pendekatan sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

KPKNL Pangkalan Bun tahun 2025 mendapatkan nilai indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 95,20 dari targetnya yang sebesar 77.

Tabel
Indeks kepuasan pengguna layanan Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	MAX
Realisasi	93,80	96,80	96,80	95,80	95,80	95,20	95,20	TLK
Capaian	93,80	96,80	96,80	95,80	95,80	95,20	95,20	

Sasaran Strategis 3	:	<i>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</i>
3a-CP IKU	:	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait layanan lelang dan piutang negara di KPKNL mencerminkan seberapa baik informasi dan pemahaman publik terhadap proses, manfaat, dan ketentuan yang berlaku dalam dua fungsi utama tersebut. Meskipun sejumlah upaya sosialisasi dan edukasi telah dilakukan melalui berbagai kanal, seperti media sosial, webinar, dan kunjungan langsung, hasil indeks menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat, pemohon lelang, maupun penanggung utang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing segmen audiens.

1. telah menerbitkan Nota Dinas Kepala KPKNL Pangkalan Bun Nomor: ND-173/KNL.1202/2025 tanggal 6 Maret 2025 hal Penyampaian Kerangka Acuan Kerja Edukasi dan Komunikasi Pengelolaan Piutang Negara dan Form Lembar Evaluasi Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada KPKNL Pangkalan Bun.
2. telah menerbitkan Nota Dinas Kepala Seksi PN Nomor: ND-37/KNL.120203/2025 tanggal 20 Mei 2025 hal Penyampaian Laporan Hasil Capaian Kinerja IKU Edukasi dan Komunikasi Triwulan 2 Tahun 2025 di Kotawaringin Timur.
3. telah menerbitkan Nota Dinas Kepala Seksi PN Nomor: ND-84/KNL.120203/2025 tanggal 29 September 2025 hal Penyampaian Laporan hasil Capaian Kinerja IKU Edukasi dan Komunikasi Triwulan 3 Tahun 2025 di Sukamara.
4. telah menerbitkan Nota Dinas Kepala Seksi PN Nomor: ND-108/KNL.120203/2025 tanggal 21 November 2025 hal Penyampaian Laporan hasil Capaian Kinerja IKU Edukasi dan Komunikasi Triwulan 4 Tahun 2025 di Seruyan

KPKNL Pangkalan Bun tahun 2025 mendapatkan nilai indeks Pengelolaan Informasi Publik (PPID) sebesar 110 dari targetnya yang sebesar 80.

Tabel
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2025

KPKNL Pangkalan Bun	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX
Realisasi	115	110	110	110	110	110	110	AVG
Capaian	115	110	110	110	110	110	110	

Sasaran Strategis 5	:	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
5a-CP IKU	:	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

Realisasi penyelesaian berkas piutang negara merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas peran KPKNL dalam menjalankan fungsi pengurusan piutang negara. Meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah berkas yang berhasil diselesaikan dari tahun ke tahun, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi kinerja, antara lain ketidaksesuaian dokumen dari instansi pengaju, keberadaan debitur yang sulit dilacak, nilai tagihan yang kecil namun jumlahnya banyak, serta keterbatasan jaminan yang dapat dilelang.

KPKNL Pangkalan Bun tahun 2025 mendapatkan nilai Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebesar 112,22% dari targetnya yang sebesar 100%.

Tabel
Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara Tahun 2025


KPKNL Pangkalan Bun	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max
Realisasi	110,00%	110,00%	110,00%	154,00%	154,00%	122,22%	122,22%	TLK
Capaian	110,00%	110,00%	110,00%	154,00%	154,00%	122,22%	122,22%	

Sasaran Strategis 7	:	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
7a-CP IKU	:	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum serta Melaksanakan setiap proses penanganan perkara di Pengadilan.

KPKNL Pangkalan Bun tahun 2025 mendapatkan nilai Indeks Penanganan Permasalahan Hukum sebesar 117,65 dari targetnya yang sebesar 100.

KPKNL Pangkalan Bun	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	MAX
Realisasi	116,17	119,22	119,22	111,76	111,76	117,65	117,65	TLK
Capaian	116,17	119,22	119,22	111,76	111,76	117,65	117,65	



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkul kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup



PENUTUP

Laporan kinerja adalah wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan perencanaan kerja, pencapaian tujuan, serta target kinerja organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, KPKNL Pangkalan Bun menyusun Laporan Kinerja yang juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai aktivitas KPKNL Pangkalan Bun serta menjadi pedoman untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada semua pihak terkait mengenai tugas dan fungsi DJKN, sehingga dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Secara internal, Laporan Kinerja ini harus menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sementara secara eksternal, Laporan Kinerja harus menjadi tolok ukur dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan tuntutan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil kerja DJKN dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Lampiran

LAMPIRAN



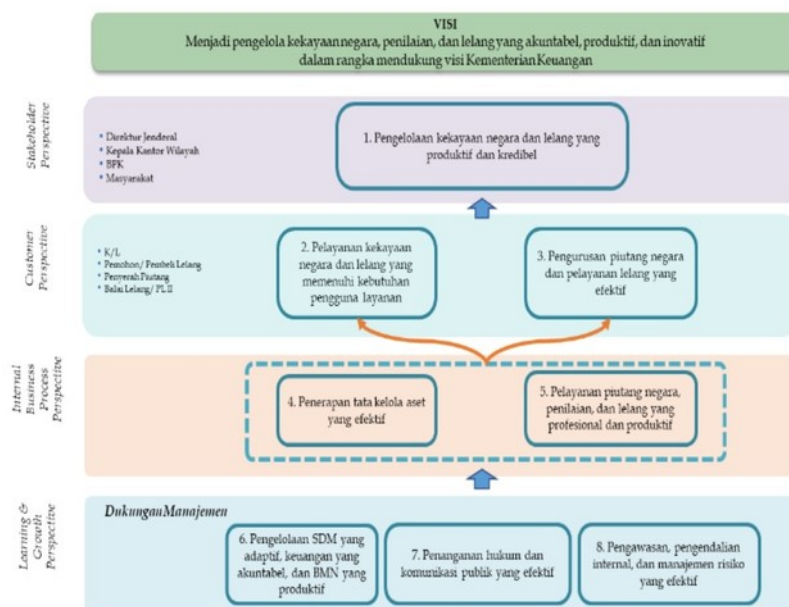
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-02/WKN.12/2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PANGKALAN BUN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala KPKNL Pangkalan Bun, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PANGKALAN BUN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Total PNBPN : Rp4,2 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp250 Juta)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp30 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp431,422,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi	Rp49,376,000
2. Pengelolaan Aset	Rp382,046,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp4,506,500,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp19,846,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp4,417,327,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp37,288,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp32,039,000

Kab. Kotawaringin Barat, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Pangkalan Bun



Ditandatangani Secara Elektronik
Ari Fitri Mahesa



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PANGKALAN BUN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Total PNBPN : Rp4,2 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp250 Juta)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp30 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Kab. Kotawaringin Barat, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Pangkalan Bun



Ditandatangani Secara Elektronik
Ari Fitri Mahesa



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALAN BUN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kab. Kotawaringin Barat, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalan Bun



Ditandatangani Secara Elektronik
Ari Fitri Mahesa



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ari Fitri Mahesa		NAMA	Tetik Fajar Ruwandari
NIP	19740723 199403 2 001		NIP	19760822 199503 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalan Bun		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalan Bun		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Total PNBPN : Rp4,2 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp250 Juta)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp30 M)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kab. Kotawaringin Barat, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ari Fitri Mahesa

19740723 199403 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

19760822 199503 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	23 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Total PNBPN : Rp4,2 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp250 Juta)



3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									(Rp30 M)
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83	83
KONSEKUENSI									



	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Kab. Kotawaringin Barat, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ari Fitri Mahesa

19740723 199403 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

19760822 199503 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026

